

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN PENOLOGI
TERHADAP TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN
DENGAN BAHAN PELEDAK**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor
3/Pid.Sus/2019/PN Pkj)**

SKRIPSI

Oleh:

Bella Asih Sahdewi

NIM. C03217006



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bella Asih Sahdewi
Semester : VIII (Delapan)
Prodi : Hukum Pidana Islam
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Alamat : Krembung Barat, RT 25 RW 11

Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Penologi Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 3/Pid.Sus/2019/Pn Pkj)** adalah asli dan bukan hasil plagiat, baik sebagian ataupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sidoarjo, 7 Juli 2021

Pembuat pernyataan



Bella Asih Sahdewi

NIM. C03217006

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Bella Asih Sahdewi NIM. C03217006 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan..

Surabaya, 5 Juli 2021

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a vertical line on the right side.

Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag, MH.

NIP. 196803091996031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis Bella Asih Sahdewi NIM. C03217006 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 29 Juli 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag, MH.
NIP. 196803091996031002

Penguji II

Drs. Achmad Yamin, M.Ag
NIP. 196707271996031002

Penguji III

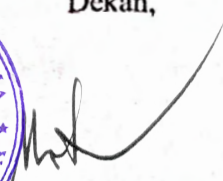
Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, SHI, M.Si
NIP. 197911502007011019

Penguji IV

Mega Ayu Ningtyas, M.H
NIP. 199312042020122017

Surabaya, 29 Juli 2021
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,




Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Bella Asih Sahdewi
NIM : C03217006
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Publik Islam
E-mail address : belladewi0233@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Penologi Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan

Dengan Bahan Peledak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 3/Pid.Sus/2019/Pn Pkj)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 1 November 2021

Penulis

()
Bella Asih Sahdewi

ABSTRAK

Skripsi dengan judul *“Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Penologi Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pkj)”* adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana sanksi hukum tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi hukum penangkapan ikan dengan bahan peledak serta bagaimana tinjauan penologi terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangakajene Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pkj tentang tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif berdasarkan bahan hukum, kemudian menelaah teori, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik dokumentasi dan wawancara. Yang selanjutnya diolah dengan beberapa tahapan yaitu *editing, organizing, analyzing*. Pengolahan data menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sanksi hukum yang digunakan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa sesuai amar putusan pada kualifikasi tindak pidana yang merujuk pada pasal 84 ayat (1). Hanya saja pada lamanya pidana terhadap diri terdakwa merujuk pada pasal 100B UU No. 45 Tahun 2009, sehingga hakim menetapkan hukuman pidana penjara selama 5 bulan. Analisis hukum pidana Islam terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan tindakan yang merusak ekosistem laut. Dalam hal ini, perbuatan tersebut dikenai sanksi hukum *ta'zir* yaitu hukuman yang tidak ditentukan secara jelas dalam *nash* baik Al-Qur'an maupun hadis mengenai tindak pidana ini. Untuk penerapan pelaksanaan hukumannya diserahkan pada *ulil amri* (penguasa) yang berpegang pada prinsip keadilan, persamaan hak dan kewajiban serta kemaslahatan umum. Dalam tinjauan penologi penjatuhan pidana yang tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan teori absolut yang mengutamakan hukuman setimpal dengan penguatan pelaku. Dan tinjauan penologi yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan yaitu berdasarkan teori relatif yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum dalam masyarakat.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka diharapkan aparat penegak hukum dan masyarakat berperan aktif dalam menjaga lingkungan khususnya tindakan penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang. Hukuman yang diberikan pada pelaku harus mempunyai efek jera sehingga pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Batasan Masalah.....	10
D. Rumusan Masalah	11
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Tujuan Penelitian	14
G. Kegunaan Hasil Penelitian	15
H. Definisi Operasional.....	16
I. Metode Penelitian.....	17
J. Sistematika Pembahasa.....	21
BAB II LANDASAN TEORI TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL	23
A. Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal Dalam Hukum Positif.....	23
1. Tindak Pidana.....	23
2. <i>Illegal Fishing</i> Dengan Menggunakan Bahan Peledak.....	25
3. Sanksi Hukum <i>Illegal Fishing</i>	27
4. Pertanggungjawaban Pidana	28
B. Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal Dalam Hukum Pidana Islam	32

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan, yang memiliki kepulauan terbesar dan terbanyak di dunia yang terdiri atas 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas sekitar 3.1 juta km² (0,3 juta km² perairan teritorial dan 2,8 juta km² perairan nusantara) atau 62% dari luas teritorialnya, sehingga menjadikan laut Indonesia dan wilayah pesisir Indonesia memiliki kandungan kekayaan dan sumber daya alam hayati laut yang sangat berlimpah, seperti ikan, terumbu karang, hutan mangrove dan sebagainya.¹

Para nelayan sering kali memanfaatkan hasil laut dengan mengambil berbagai jenis ikan. Perikanan merupakan cara strategis untuk meningkatkan kondisi ekonomi rakyat Indonesia. Strategis tersebut tercermin dari kondisi objektif wilayah Indonesia kurang lebih luasnya 7,8 km: 74,3% terdiri dari laut dan 25,7% daratan. Perairan lautan seluas 5,8 juta km mencakup 0,3 juta km laut tertorial, 2,8 juta km perairan nusantara, 2,7 juta Zona Ekonomi

² Yulia A. Hasan, *Hukum Laut Konservasi Sumber Daya Ikan Di Indonesia* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2020), 1.

Banyak nelayan yang melakukan penangkapan ikan secara illegal di wilayah perairan Indonesia, baik nelayan lokal maupun nelayan asing. Nelayan dari luar negeri sengaja masuk kawasan perairan Indonesia untuk mengambil ikan maupun kekayaan laut lainnya. Kapal patroli negara-negara luar mulai masuk ke perairan Indonesia yang seharusnya mereka tidak berhak atas perairan tersebut.⁵

Kesadaran akan pentingnya menjaga dan melestarikan sumber daya laut harus lebih ditekankan. Para nelayan ingin memperoleh hasil tangkapan

⁴ Marlina, *Aspek Hukum Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan* (Jakarta: Sofmedia 2013), 2.

[illegible]

yang banyak dengan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang, tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan setelah penggunaan bom tersebut. Penggunaan bom ikan menimbulkan dampak dan kerugian yang sangat banyak, baik dari aspek ekonomi, ekologi, maupun sosial.

Kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh timbulnya masalah lingkungan dapat mencapai ratusan juta. Secara umum dapat digambarkan kerugian-kerugian ekonomi dari penggunaan bahan peledak dalam menangkap ikan berupa biaya penanaman kembali terumbu karang yang hancur akibat penggunaan bahan peledak, serta melemahkan upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan daya saing produk perikanan.

Konservasi sumber daya alam merupakan langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang ditimbulkan akibat penyelewengan tindakan penangkapan ikan yang dilakukan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menetapkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan menurut jenis atau kelompok sumber daya alam hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Untuk kepentingan pelestarian sumber daya alam hayati di laut, pasal 6 PP No.15 Tahun 1984 melarang penangkapan ikan di ZEE Indonesia dengan menggunakan bahan peledak, listrik, racun, dan bahan atau alat lain yang berbahaya.

Pada pasal 3 ayat (2) UU No. 9 Tahun 1985 tentang perikanan dinyatakan, bahwa:

- 1) Alat-alat penangkapan ikan
- 2) Syarat-syarat teknis penangkapan ikan yang harus dipenuhi oleh kapal perikanan
- 3) Jumlah penangkapan ikan, jenis dan serta ukuran ikan yang tidak boleh ditangkap
- 4) Daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan
- 5) Pencegahan pencemaran dan kerusakan, rehabilitasi dan penebaran jenis ikan baru
- 6) Pembudidayaan ikan dan perlindungannya
- 7) Pencegahan dan pemberantasan hama serta penyakit ikan
- 8) Hal lain yang perlu.⁶

⁶ N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan Hidup Dan Ekologi Pembangunan*, Edisi Ii (Jakarta, Erlangga, 2004), 217.

Tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan /atau hayati yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.”⁸

Peristiwa penangkapan ikan dengan cara yang tidak sah merupakan kejahatan ataupun pelanggaran di wilayah perairan, penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan undang-undang, aktivitasnya tidak dilaporkan kepada lembaga terkait.⁹ Secara umum penangkapan ikan ilegal ada beberapa macam yaitu penangkapan ikan yang tidak disertai izin, penangkapan ikan dengan

⁹ Nunung Mahmuda, *Illegal Fishing* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 80.

jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan ketentuan, penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang.¹⁰

Salah satu contoh kasus pelanggaran *illegal fishing* terkait putusan yang pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Pangkajene tentang penangkapan ikan dengan bahan peledak Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pkj. Dalam menanggulangi pelanggaran kasus tersebut, pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang Khusus Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang mengatur perikanan di Indonesia, seperti tercantum dalam Pasal 84 ayat (1) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang berbunyi:\

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Dalam putusan tersebut tersebut hakim memutuskan hukuman pidana selama 5 bulan, tanpa dikenai hukuman denda. Sedangkan dalam pasal 84 ayat 1 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan dipidana paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah). Banyaknya kasus kejahatan perikanan, disinilah peran hukum pidana menjadi media untuk mengendalikan dan mencegah tindakan

¹⁰ Nia Widiyanti, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Illegal Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 111/Pid.Sus/2017/Pn. Dmk” (Skripsi Uin Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2019), 3.

bawah laut yang merupakan tempat berlangsungnya ikan dan makhluk hidup lainnya.

Dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 41 telah disebutkan mengenai perusakan lingkungan yang diakibatkan oleh perbuatan manusia yang berbunyi sebagai berikut:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41)

Artinya : “Telah tampak kerusakan di darat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS Ar-Rum:41)¹²

Ayat tersebut menjelaskan larangan akan merusak bumi. Allah SWT. telah menciptakan bumi ini sebagai bagian dari fasilitas hidup bagi manusia. Oleh karena itu, manusia wajib menjaga, memelihara, dan melakukan konservasi terhadap kerusakan dimuka bumi, khususnya laut dari berbagai kerusakan dan memanfaatkan laut dengan sebaik-baiknya. Apabila manusia tidak menjaga laut dengan baik maka dapat menyebabkan bencana yang dapat membahayakan manusia.

Dalam hukum pidana Islam terdapat tiga ketentuan hukum yang terdiri dari *hudud*, *qishash* dan *ta'zir*. Yang dimaksud dengan *hudud* adalah hukuman yang sudah terdapat di dalam Al-Qur'an maupun Hadis. *Qishash* adalah hukuman mengenai pelanggaran jiwa atau bagian badan seseorang,

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya: Al-Hidayah, 2002), 576.

hukuman yang diberikan pada pelaku harus disesuaikan dengan tindakan yang telah dilakukan. Sedangkan *ta'zir* adalah hukuman yang ditentukan oleh penguasa atau hakim.

Hukuman terkait *illegal fishing* tidak terdapat dalam Al-Qur'an maupun Hadis, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji terkait sanksi hukum yang akan diberikan pada pelaku penangkapan ikan secara ilegal. Kemaslahatan manusia terganggu akibat dampak yang ditimbulkan dari kasus *illegal fishing*. Banyak kerugian yang ditimbulkan. Harus ada hukuman yang diberikan, agar pelaku merasa jera atas perbuatannya. Menurut 'Abd al-Qadir 'Audah mendefinisikan hukuman yaitu:

الْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمُقَرَّرُ لِمُصْلِحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عِصْيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ.

“Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan shari’.”¹³

Tujuan memberikan hukuman kepada pelaku *jarimah* adalah untuk menyelamatkan jiwa manusia baik perseorangan atau masyarakat, dari kerusakan serta menyingkirkan hal-hal yang mendatangkan kejahatan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan mengamati kemungkinan situasi dari semua masalah diatas, penulis memilih judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Penologi Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pki)”.

¹³ Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya : Pustaka Idea, 2015), 84-85.

B. Identifikasi Masalah

Menurut latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang ditimbulkan sebagai berikut:

1. Deskripsi tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak
2. Akibat yang ditimbulkan dari adanya penangkapan ikan dengan bahan peledak
3. Sanksi tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak dalam putusan Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pkj
4. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pkj tentang penangkapan ikan dengan bahan peledak
5. Tinjauan penologi terhadap putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pkj tentang penangkapan ikan dengan bahan peledak

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Sanksi hukum tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pkj
2. Tinjauan hukum pidana Islam mengenai hukuman penangkapan ikan dengan bahan peledak dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pkj
3. Tinjauan penologi terhadap sanksi hukum penangkapan ikan dengan bahan peledak dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pkj

E. Kajian Pustaka

Dalam proses penelitian ini, penulis melakukan kajian pustaka terhadap penelitian terdahulu untuk memastikan bahwa tidak ada duplikasi dalam penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Karya Ilmiah Nia Widiyanti, Prodi Hukum Pidana Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2019 yang berjudul *“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 111/Pid.Sus/2017/Pn.Dmk”* yang membahas mengenai tindak pidana pengoperasian kapal tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) berdasarkan Pasal 98 Jo pasal 42 ayat (3) UU RI

- ¹⁴ Nia Widiyanti, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor:111/Pid.Sus/2017/Pn.Dmk* (Skripsi Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

[illegible]

- ¹⁶ Lukman Hakim Adam, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perikanan Studi Kasus Putusan No. 1068/Pid.B/2011/Pn.Mks* (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013).

5. Jurnal penelitian hukum penulis *I Komang Suka'arsana* pada Tahun 2018 dengan judul “Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ikan”.¹⁸ Penelitian tersebut membahas *pengaturan penangkapan ikan di wilayah Perairan Indonesia berdasarkan UU Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan*. Terdapat perbedaan pembahasan dengan penelitian ini, dalam skripsi ini membahas mengenai putusan pengadilan terkait sanksi hukuman yang kurang sesuai dengan undang-undang.

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- ¹⁷Inggrit Fernandes, “Tinjauan Yuridis *Illegal Fishing* Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perikanan”, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 17 No. 1 (2017), 189.

[illegible]

- ## G. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Aspek Keilmuan (teoretis)

2. Aspek Terapan (praktis)

H. Definisi Operasional

[illegible]

- ## I. Metode Penelitian

²¹<https://www.google.com/amp/s/www.mongabay.co.id/2019/06/20/tangkap-ikan-pakai-bom-dan-potasium-masih-marak-di-maliku-utara/amp/>, “Diakses Pada” 3 Maret 2021.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yang menitikberatkan pada data yang terkumpul berupa tulisan bukan angka.²³ Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif berdasarkan bahan hukum, kemudian menelaah teori, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara online di lapangan untuk mencari data, dan mengumpulkan bahan hukum untuk dianalisis.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu menceritakan fenomena atau gejala-gejala terjadinya tindakan *illegal fishing*.²⁴ Kemudian menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor: 3/pid.sus/2019/PN Pkj.

[illegible]

Terdapat dua sumber data dalam suatu penelitian yaitu sumber data primer dan sekunder, yang masing-masing dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber yang didapatkan secara langsung. Pada Prinsipnya, penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research).²⁵ Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 3/pid.sus/2019/PN Pkj
- 2) Wawancara salah satu hakim Pengadilan Negeri Pangkajene
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 4) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan bahan data yang berfungsi sebagai pendukung terhadap kelengkapan penelitian. Adapun yang menjadi data sekunder sebagai berikut:

- 1) Yulia A. Hasan, Hukum Laut Konservasi Sumber Daya Ikan Di Indonesia, Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2020.
- 2) Sudirman Saad, Hak Pemeliharaan Dan Penangkapan Ikan, Yogyakarta: Lkis Yogyakarta 2009.
- 3) Ali Geno Berutu, Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam), Purwokerto, CV Pena Persada, 2020.

²⁵ Mestika Zad, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 3.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- ## 5. Teknik Pengolahan Data

²⁶ Ridwan, *Metode Dan Teknik Penyusunan Tesis* (Bandung: Alfabeta, 2006), 148

²⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers.2016), 112.

²⁸ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 105.

Analisis data merupakan tindakan peneliti untuk mempertemukan kesenjangan antara teori dan praktik dalam membangun analisis yang berkaitan dengan pengujian teori yang berlaku.³¹ Metode ini bertujuan, untuk mendeskripsikan keadaan dalam pelaksanaan penjatuhan sanksi hukum putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor: 3/Pid.Sus/2019/PN Pkj. Data

³⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 201

[illegible]

21

Pola pikir yang digunakan adalah pola pikir deduktif yang berangkat dari faktor yang umum, yaitu penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dalam putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pkj, yang kemudian dikaitkan kedalam hal yang sifatnya lebih khusus.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan unsur penting yang harus ada disetiap pembahasan suatu masalah, untuk memberikan pemahaman pada pembaca dalam memahami alur skripsi ini. Berikut merupakan sistematika pembahasan skripsi ini:

Bab pertama adalah pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat landasan teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan. Berisi tentang tinjauan umum penangkapan ikan secara ilegal dalam perspektif hukum positif, serta dalam hukum pidana Islam membahas mengenai konsep hukuman *ta'zir*, dari pengertian, macam-macam. Serta penologi yang dikaitkan dengan sanksi hukum tindak pidana *illegal fishing*.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL

A. TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL DALAM HUKUM POSITIF

1. Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Pembentuk undang-undang menggunakan kata *strafbaarfeit* untuk menyebut apa yang dikenal dengan tindak pidana, tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*.

Feit dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan“ atau “*een gendeelte van de werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, sehingga perkataan *strafbaarfeit* dapat diterjemahkan sebagai “bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.

Selain istilah *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda juga memakai istilah lain yaitu “*delict*” yang berasal dari bahasa latin “*dellictum*” dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik. Dalam bahasa Indonesia dikenal juga

Istilah *illegal fishing* dipakai oleh aparat penegak hukum terkait tidak pidana dibidang perikanan. *Illegal fishing* berasal dari kata ilegal yang berarti tidak sah atau tidak resmi. *Fishing* merupakan kata benda berarti perikanan,dari kata fish dalam bahasa inggris berarti ikan,mengambil,merogoh, mengail atau memancing.

[illegible]

Kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak ketentuan pidananya berada pada Pasal 84 ayat (1) yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dalam kegiatan penangkapan ikan dilarang menggunakan bahan peledak, penangkapan ikan yang diperbolehkan yaitu harus menggunakan alat penangkap ikan yang ramah lingkungan sehingga tidak merusak ekosistem laut.

Yang dimaksud bahan peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair atau campurannya, yang apabila terkena panas, atau benturan, atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat lain yang berbentuk gas. Bahan peledak terdiri dari dua jenis yaitu, bahan peledak kuat dan bahan peledak lemah, bahan peledak yang kuat merupakan bahan peledak yang berupa campuran senyawa kimia yang banyak digunakan, misal dalam militer atau sipil yang bertujuan sebagai penghancur. Sedangkan bahan peledak yang lemah merupakan bahan peledak penghancur, tetapi digunakan sebagai bahan isian pendorong amunisi dan *potassium klorat* yang digunakan sebagai bahan untuk membuat petasan.

3. Sanksi Hukum *Illegal Fishing*

Hukuman dan sanksi di Indonesia sangat beragam berdasarkan jenis kejahatan yang telah dilakukan, yaitu sebagai berikut:

a. Pidana Penjara

Sanksi ini diberikan pada setiap pelaku yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku, seperti melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dengan tujuan mendapatkan jumlah tangkapan ikan yang banyak, akan tetapi akibat yang ditimbulkan sangat merugikan yaitu rusaknya ekosistem laut.

b. Pidana Denda

Pidana denda adalah pidana berupa pembayaran sejumlah uang oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan. Tujuan dari pidana denda yaitu pencegahan terhadap perbuatan kejahatan dan mengembalikan kerugian yang telah diderita negara sebagai pihak yang dirugikan secara langsung akibat kejahatan *illegal fishing*. Dalam UU No. 45 Tahun 2004 disebutkan bahwa pidana tambahan melekat pada setiap sanksi pidana penjara yang dibebankan pada pelaku, sehingga setiap pasal yang menyebutkan pidana penjara pasti ditambah dengan pidana denda.³³

Terdapat beberapa kelemahan pidana denda, diantaranya:

- 1) Bahwa pidana denda ini dapat dibayar oleh pihak ketiga, sehingga pelaku tidak dapat merasakan tujuan pidana, yang seharusnya pelaku dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

³³ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). 8.

Sanksi penyitaan adalah hukuman tambahan yang diberikan kepada pelaku, sanksi yang dijatuhkan yaitu berupa penyitaan kapal serta peralatan yang dipakai saat menangkap ikan, dan juga dilakukan perampasan hasil tangkapan yang diperoleh, kemudian hasil sitaan tersebut dijadikan sebagai barang bukti di pengadilan.

Pertanggungjawaban pidana merupakan sesuatu yang menentukan apakah seseorang dipidana atau dibebaskan. Konsep pertanggungjawaban pidana tidak terkait hukum saja tetapi menyangkut nilai moral atau kesusilaan umum yang berada di tengah masyarakat, hal ini dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan.³⁴

Menurut Ruslan Saleh pertanggungjawaban pidana adalah lanjutan dari celaan objektif.³⁵ Yang dimaksud celaan objektif yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang bertentangan dengan

³⁵Roeslan Saleh. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 33

Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang utama dibatasi oleh perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*). Dapat dipidananya delik culpa sifatnya hanya pengecualian apabila ditentukan secara tegas oleh undang-undang. Sedangkan pertanggungjawaban terhadap suatu akibat tertentu dari tindak pidana yang di undang-undang diperberat ancaman pidananya, hanya dikenakan apabila ia sudah dapat menduga kemungkinan akibat yang terjadi atau apabila terdapat kealpaan. Jadi hukuman yang diberikan tetap berorientasi pada kesalahan yang sudah dilakukan.

[illegible]

Kewenangan hakim untuk memberi maaf dengan tidak menjatuhkan sanksi pidana, diimbangi dengan asas *culpa in causa* atau asas *actio libera in causa*, dengan memberikan kewenangan pada hakim untuk tetap mempertanggungjawabkan pelaku walaupun terdapat alasan penghapus pidana. Ketentuan ini terdapat pada Pasal 56 yang menyatakan bahwa “Seseorang yang melakukan tindak pidana dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan penghapus pidana, jika orang tersebut patut disalahkan sebagai penyebab terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana tersebut.

B. Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

1. *Ta'zir* Dalam Hukum Pidana Islam

Ta'zir adalah hukuman yang tidak ditentukan secara sarif (jelas) dalam *nash* baik dalam al-Quran maupun dalam al-Hadis yang berkaitan

³⁷ Ibid, 20.

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ , إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Hadis diatas memberikan penjelasan mengenai batas hukuman *ta'zir* yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan, untuk membedakan dengan jarimah hudud. Batasan hukuman ini yang membedakan antara jarimah hudud dan jarimah ta'zir. Menurut Al-Kahlani, para ulama' sepakat

[illegible]

- 1) Sanksi kurungan/penjara

Ada dua macam hukuman kurungan/penjara menurut lamanya waktu hukuman. *Pertama*, hukuman kurungan terbatas, batas paling rendah yaitu kurungan satu hari, untuk batas tertinggi terdapat perbedaan pendapat dari para ulama. Ulama Syafi'iyah menetapkan satu tahun karena disamakan dengan pengasingan

[illegible]

2) Sanksi pengasingan

- a) Menurut Imam Syafi'i, jarak perjalanan shalat qasar seperti jarak antar kota asal dengan kota pengasingan.
- b) Menurut Imam Abu Hanifah pengasingan sama dengan dipenjarakan.
- c) Menurut Umar bin Abdul Aziz, pengasingan dibuang dari kota satu ke kota lain.
- d) Menurut Umar pengasingan untuk yang melakukan jarimah yaitu dari Madinah ke Syam.
- e) Menurut Ali pengasingan untuk yang melakukan jarimah dari Madinah ke Bashrah.

c. Sanksi yang berkaitan dengan harta

Ibn Taimiyah membagi sanksi *ta'zir* menjadi tiga, yaitu:

Contohnya, Umar menumpahkan susu yang dicampur dengan air untuk menipu pembeli. Ada ulama yang mengatakan bahwa *itlaf al-malitu* bukan bukan dengan cara menghancurkan, melainkan diberikan pada fakir miskin bila harta tersebut halal dimakan.

Contohnya, mengubah patung yang disembah oleh muslim dengan cara menghilangkan kepalanya.

- a. Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendah. Dalam hukuman jenis ini, hakim tidak berwenang

a. Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendah. Dalam hukuman jenis ini, hakim tidak berwenang

- a. Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendah. Dalam hukuman jenis ini, hakim tidak berwenang

b. Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada jarimah-jarimah ta'zir.

a. Hukuman yang sudah ditentukan ('Uqubah Muqaddarah), yaitu hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara' dan hakim berkewajiban untuk memutuskannya tanpa mengurangi, menambah, atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Hukuman ini disebut hukuman keharusan ('Uqubah Lazimah). Dinamakan demikian, karena ulil amri tidak berhak untuk menggugurkannya atau memaafkannya.

[illegible]

C. Sanksi Pidana Dalam Tinjauan Penologi

Sanksi ta'zir adalah sanksi tambahan hukuman pokok. Contohnya pelaku yang dikenai hukuman pokok penjara sekaligus dipecat dari jabatannya. Apabila terdapat bukti-bukti yang kurang meyakinkan atau adanya keraguan menurut hakim maka hukuman pokok tidak boleh dijatuhkan. Kurangnya bukti dalam *jarimah hudud* dan *qisas* dapat mengubah status *jarimah* menjadi *jarimah ta'zir*.

C. Sanksi Pidana Dalam Tinjauan Penologi

Penologi adalah bagian dari hukum *penitensier*. *Penitensier* berasal dari kata *Penitenaire Recht* yang diartikan dengan perkataan hukum tentang pemidanaan. Hukum *penitensier* memuat keseluruhan norma-norma yang

⁴⁴Iqraq Sulhin, *Diskontinuitas Penologi Punitif*, (Jakarta: Kencana, 2016), 267.

Dalam sistem penegakan hukum pidana terdapat sistem pembuktian diantaranya:

1. Pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif

Pembuktian menurut undang-undang secara positif keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian dalam pembuktian kesalahan terdakwa. Sistem ini hanya melihat pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang berdasarkan alat bukti yang sah. Terpenuhinya syarat dan ketentuan menurut undang-undang telah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim.

2. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim

Sistem pembuktian ini menentukan salah tidaknya seseorang terdakwa berdasarkan keyakinan hakim. Keyakinan diambil dan disimpulkan oleh hakim berdasarkan alat bukti yang diperiksa dalam persidangan. Atau hakim bisa menarik keyakinan berdasarkan pengakuan langsung dari terdakwa. Dalam pembuktian ini keyakinan hakim memegang peran penting dalam penentuan kesalahan terhadap terdakwa. Hakim harus bisa menguraikan dan menjelaskan alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim harus bisa masuk akal dan mempunyai dasar alasan yang logis.

3. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif

Sistem pembuktian ini merupakan perpaduan antara sistem pembuktian menurut undang-undang dengan sistem pembuktian

menurut keyakinan hakim. Rumusan dari teori ini berbunyi, salah satunya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan dari alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.⁴⁵

**TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DENGAN BAHAN
PELEDAKDALAM PERKARA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
PANGKAJENE NOMOR 3/PID.SUS/2019/PN.PKJ**

Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekitar Pukul 15.00 Wita, bertempat diperairan sebelah barat perairan Pulau Dewakang, Kecamatan Liukang Kalmas, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama H. Supriadi Alias H. Opi Bin H. Mujit berumur 33 tahun bersama empat orang lainnya yaitu Asrul, Parman, Aspar, dan Hamzah menggunakan perahu joloro milik H. Mujit (orang tua terdakwa) menuju kearah perairan sebelah barat pulau Dewakang Kec. Liukang Kalmas Kab.Pangkep, dan membawa 15 (lima belas) botol plastik bekas air mineral ukuran 1,5 Liter yang berisikan bom ikan yang sudah dirakit dan sudah siap dipakai diledakan untuk menangkap ikan, selanjutnya terdakwa menemukan perkumpulan ikan, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) botol bom ikan atau bahan peledak yang sudah siap diledakan dan melemparkan bom ikan ditempat perkumpulan ikan tersebut, setelah kurang lebih 15 menit terdakwa dan Aspar menyelam untuk mengambil ikan sebanyak 4 (empat) Gabus.

1. Keterangan Saksi-Saksi

Dari keterangan saksi Muh Ashar Bin Abd Kadir dan Ilham Bin Asyaf memberikan keterangan bahwa:

⁴⁶ Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene, Nomor 3/Pid.Sus/2019/Pn Pkj, 20.

- a. 1 (satu) botol plastik bekas air mineral ukuran 1,5 liter berisikan pupuk ammonium nitrate yang sudah dicampur bensin dan minyak tanah.
- b. 5 (lima) buah kaca mata selam
- c. 3 (tiga) pasang sepatu karet warna hitam.

- Jumlah ikan yang telah berhasil ditangkap oleh terdakwa pada hari itu dengan menggunakan alat bom ikan diatas kapalnya adalah sebanyak 4 (empat) gabus yang terdiri dari ikan jenis sindrili. Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi ahli tersebut merupakan bagian dari seksi Pengawasan dan Konservasi di Perairan Kab. Pangkep, namun beberapa kali dipanggil dipersidangan ahli tidak hadir. dan terdakwa tidak keberatan dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

[illegible]

pembuluh darahnya pecah atau kehilangan salah satu matanya, sisik terkelupas pada beberapa bagian tubuh, Tulang ikan retak dan atau patah-patah dan daging ikan lunak atau bahkan hancur, dan gelembung renang pecah serta organ dalam lainnya mengalami kerusakan.

Bahwa 5 (lima) ekor ikan yang telah ditangkap oleh terdakwa setelah diuji pemeriksaan di laboratorium forensik Polri Cab Makassar dengan hasil pemeriksaannya mengalami kerusakan pada gelembung renang dan organ dalam serta keretakan tulang perut akibat getaran yang kuat, jadi dapat disimpulkan bahwa ikan tersebut sesuai hasil pemeriksaan analisis forensik menunjukkan bahwa ikan tersebut benar-benar terkena getaran yang kuat akibat bahan peledak atau bom ikan.

Bahwa penggunaan bahan peledak dalam melakukan penangkapan ikan sangat dilarang keras, karena dapat mengancam keselamatan jiwa pelakunya serta orang sekitarnya, juga mengganggu, merusak dan juga merugikan serta membahayakan sumber daya ikan dan lingkungannya khususnya terhadap generasi, stabilitas dan keseimbangan potensi sumber daya ikan dan lingkungannya.

Bahwa alat penangkap ikan yang diperbolehkan yaitu alat penangkap ikan yang ramah lingkungan, tidak merugikan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya seperti jaring, perangkap (bubu), serta pancing dan sejenisnya.

Bahwa akibat yang ditimbulkan perilaku tersebut adalah merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya khususnya terhadap regenerasi, keseimbangan dan stabilitas potensi ikan dan lingkungan, ekosistem terumbu karang dan ekosistem lainnya. Bahwa kerusakan akibat penggunaan bahan peledak (bom ikan) yakni sebahagian dapat dipulihkan kembali namun hal ini memerlukan waktu yang sangat lama dan panjang, serta hal ini sangat sulit dan tidak mungkin pulih seperti semula.

Terdakwa yang bernama H. Supriadi Alias H. Opi Bin H. Mujit merupakan warga Negara Indonesia yang ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Liukang Kalmas pada hari Minggu tanggal 02 Desember Desember 2018 sekitar Pukul 15.00 Wita, bertempat di perairan sebelah barat perairan Pulau Dewakang, Kecamatan Liukang Kalmas, Kabupaten Pangkep. Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat menangkap ikan bersama Asrul, Parman, Aspar, dan Hamzah. Terdakwa membawa 15 (lima belas) botol plastik bekas air

[illegible]

Bahwa pada saat ditangkap ditemukan :

- [illegible]

4. Barang Bukti Yang Disita

- [illegible]

Dalam putusan tersebut, keterangan saksi dan fakta hukum yang jadi pertimbangan Hakim menentukan apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dakwaan tunggal yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Perumusan unsur “setiap orang” dalam ilmu hukum pidana menunjukkan pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum.

[illegible]

- a. Keadaan yang memberatkan:
 - 1) Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas dan mencegah penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, Perbuatan terdakwa dapat mengancam ekosistem laut.
- b. Keadaan yang meringankan:
 - 1) Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan.
 - 2) Terdakwa adalah tulang punggung keluarga. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
 - 3) Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
 - 4) Terdakwa Belum Pernah Dihukum.⁴⁷

Mengingat, Pasal 84 ayat (1) UU RI Nomor 45 tahun 2009
tentang Perikanan, Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa H Supriadi alias H Opi Bin H Mujit telah bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja Membawa dan/atau menggunakan bahan peledak dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

⁴⁷ Ibid., 67.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti yang akan dimusnahkan berupa:
 - a) 1(satu) pasang sepatu katak warna biru;
 - b) 3(tiga) pasang sepatu karet warna hitam;
 - c) 5(lima) buah kacamata selam;
 - d) 1(satu) botol plastic bekas air mineral ukuran 1,5 liter berisikan pupuk
 - e) ammonium nitrate yang sudah dicampur bensin dan minyak tanah;
 - f) 2(dua) pasang timah pemberat;2(dua) tombak;
 - g) 1(satu) silengger mesin;
 - h) 2(dua) buah jarring tempat penampungan ikan;
 - i) ½(setengah) petih ikan tangkapan berbagai jenis;
- Di kembalikan kepada pemiliknya H.Mujit
- a) 1(satu) perahu Jolloro berwarna biru langit kombinasi putih bermesin Yanmar 300 warna merah, dan yang dibelakang mesin campawang 24 warna abu-abu;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Wawancara dilakukan pada hari Kamis 4 Maret 2021. Dilakukan secara online melalui Aplikasi WhatsApp. Wawancara dilakukan pada Hakim anggota 1 beliau bernama Ima Fatimah Djufri, S.H, MH. Dalam wawancara tersebut, beliau mengatakan bahwa terdakwa H. Supriadi Alias H. Opi Bin H. Mujit telah melakukan tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak. Bahwa Majelis Hakim setuju dengan pendapat jaksa penuntut umum, karena perbuatan terdakwa terbukti bertentangan dengan undang-undang, dan terdakwa sadar melakukan perbuatan tersebut dengan kata lain perbuatan terdakwa dilakukan dengan sengaja. Bahwa terdakwa tergolong “nelayan kecil” sehingga terhadapnya dapat

[illegible]

pertimbangan seperti yang disebutkan diatas, maka penjatuhan la pidana terhadap terdakwa diterapkan Pasal 100B. (Ima Fatimah Dju

pertimbangan seperti yang disebutkan diatas, maka penjatuhan la pidana terhadap terdakwa diterapkan Pasal 100B. (Ima Fatimah Dju

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN PENOLOGI TERHADAP
TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DENGAN BAHAN PELEDAK
DALAM PUTUSAN HAKIM NOMOR 3/Pid.Sus/2019/PN Pkj**

Dalam kasus ini, tindakan *illegal fishing* yang dilakukan oleh pelaku termasuk kejahatan yang menyebabkan kerugian hukum karena menangkap ikan yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam hal ini, tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak merupakan salah satu kegiatan *illegal fishing* yang diatur dalam pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan / atau mengawetkannya.⁵⁰

⁵⁰ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta: Kencana, 2017), 170.

Unsur pertama yaitu “Setiap Orang” yang mengandung arti bahwa orang tersebut sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh karena itu unsur setiap orang meliputi WNI/WNA atau korporasi yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan fakta dipersidangan, tentang identitas terdakwa yang dibenarkan oleh para saksi dipersidangan. Dapat diambil kesimpulan bahwa yang dihadapkan didepan Hakim adalah terdakwa. Dengan ini unsur setiap orang terpenuhi.

Unsur kedua adalah “Dengan Sengaja”, yang berarti dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan atau pembudiayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, biologis, bahan peledak, alat dan atau cara dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya.

Sesuai keterangan saksi yang juga sama dengan keterangan terdakwa yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak. Berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berbandapat bahwa unsur kedua terpenuhi.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan unsur yang terpenuhi, Hakim meyakini terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal

Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa diantaranya adalah:

1) Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas dan mencegah penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, Perbuatan terdakwa dapat mengancam ekosistem laut.

- 1) Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan.
- 2) Terdakwa adalah tulang punggung keluarga. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- 3) Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- 4) Terdakwa belum pernah dihukum⁵¹

⁵¹ Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene, Nomor 3/Pid.Sus/2019/Pn Pkj, 69.

Melihat pertimbangan hakim pelaku dikenai hukuman pidana penjara selama 5 bulan tanpa hukuman denda sebagai hukuman pokok. Dalam ancaman hukuman yang dilakukan pelaku yaitu Pasal 84 ayat (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 yaitu pidana penjara paling lama 6 Tahun dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Pada dasarnya sifat hukuman pada bidang perikanan yaitu kumulatif, dalam hukum kumulatif pidana penjara dan pidana denda harus diterapkan dua-duanya. Sehingga Majelis Hakim seharusnya menjatuhkan hukuman pidana dan juga denda pada terdakwa karena sudah terbukti bersalah dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dengan bahan peledak. Hukuman yang diberikan harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hukuman tersebut dijatuhkan agar terdakwa merasa jera atas perbuatan yang telah dilakukan sehingga tidak akan mengulangnya lagi. Dan ini dilakukan untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran yang lain. Pelaku yang bersalah harus mendapatkan hukuman pidana dan denda yang harus dibayarkan sesuai putusan yang ditetapkan hakim.

Sifat kumulatif dalam Undang-Undang perikanan cirinya terdapat kata “dan”, sehingga kata “dan” dalam UU No 49 Tahun 2009 tentang perikanan merupakan hukuman wajib yang harus dijatuhkan yaitu pidana penjara dan denda. Namun dalam kenyataannya Hakim hanya menjatuhkan salah satu hukuman pidana, yaitu pidana penjara saja tanpa dijatuhi hukuman denda. Karena Hakim melihat bahwa terdakwa

Dengan adanya kasus tindak pidana perikanan dalam putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pkj. Pidana penjara 5 bulan dirasa terlalu ringan untuk tindak pidana penangkapan ikan secara *illegal*, dan belum bisa dipastikan bahwa pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya, karena terbukti masih banyak kasus penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak.

Hakim wajib memiliki pedoman dalam memutuskan perkara *fiqih jinayah* yaitu al-qur'an, as-sunnah dan hukum lain yang diijma'kan. Hakim harus memiliki pengetahuan hukum dan bisa menggambarkan peristiwa yang terjadi, sehingga bisa menerapkan hukum yang sesuai.

[illegible]

- Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak bila dikaitkan dengan hukum pidana Islam merupakan tindakan merugikan negara dari segi ekonomi. Perbuatan tersebut tidak mendukung program pemerintah untuk menjaga kelestarian laut dan tidak memeperhatikan peraturan yang telah di buat oleh pemerintah. Perbuatan terdakwa menyebabkan kehidupan di laut menjadi rusak akibat bom yang di lemparkan pada saat mencari ikan. Kejahatan ini berdampak pada rusaknya terumbu karang dan berkurangnya populasi binatang di laut.

Yang dimaksud jarimah ta'zir adalah suatu hukuman yang belum ditentukan secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberikan pelajaran pada pelaku. Dalam kasus yang dibahas oleh penulis sanksi hukum Hakim berupa sanksi ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, terdakwa H. Supriadi Alias H. Opi Bin H. Mujit dikenai hukuman penjara yaitu selama 5 bulan. Hukuman tersebut ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan hukuman. Hukuman ini disebut dengan '*Uqubah Mukhoyyaroh*', yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya.

Hukum pidana Islam mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan diakhirat. Dalam hal penjatuhan sanksi sudah sepatutnya sebanding dengan perbuatan jarimah yang dilakukan terdakwa. Karena tujuan sanksi ta'zir yang diberikan pada terdakwa diharapkan membawa perbaikan sikap dan perilakunya dikemudian hari.

[illegible]

Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dalam Putusan Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2019 merupakan pelanggaran yang menimbulkan dampak besar pada wilayah perairan Indonesia. Perbuatan terdakwa dapat merusak ekosistem terumbu karang dan sumber daya ikan serta lingkungannya yang berdampak pada menurunnya produktifitas perikanan. Dan dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nelayan pesisir, serta mempengaruhi kemampuan terumbu karang untuk meminimalisir gelombang dan arus pantai.

Dalam kaitannya dengan penologi sanksi hukum yang diberikan pada terdakwa tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan. Dalam kenyataannya sekarang masih banyak nelayan yang menggunakan bahan peledak dalam penangkapan ikan, meskipun sudah ada undang-undang yang dapat menjerat pelaku. Faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak dalam penangkapan ikan disebabkan karena pelaku kurang mengetahui akibat dari perbuatannya, rendahnya pendidikan pelaku, serta kurangnya pengetahuan akan hukuman yang akan diberikan atas perbuatan yang dilakukan.

Upaya yang bisa dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak yaitu dengan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat akan bahaya penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan serta akibat hukum yang diterima oleh pelaku.

Dilakukannya pengawasan yang lebih ketat apakah penangkapan ikan di laut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak ini jika dikaitkan teori gabungan dalam penologi, mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat. Penjatuh pidana selama 5 bulan kepada terdakwa bertujuan untuk pembalasan dan dapat mempertahankan tata tertib hukum agar kepentingan umum dapat terselamatkan dan terhindar dari kejahatan. Pidana yang bersifat pembalasan dapat dibenarkan karena bermanfaat bagi pertahanan tata tertib hukum masyarakat. Penjatuh pidana selama 5 bulan pada terdakwa juga bertujuan menakut-nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdaya terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak yang bisa merusak ekosistem laut.

Hukum pidana berbeda dengan hukum lainnya, yang membedakan yaitu sanksi berupa pidana yang diancamkan kepada pelanggar hukum. Dalam sistem hukum Indonesia menganut asas legalitas, asas ini merupakan fundamental dalam rangka negara hukum. Asas legalitas terdapat dalam KUHP Pasal 1 ayat 1 yang mengatakan bahwa:

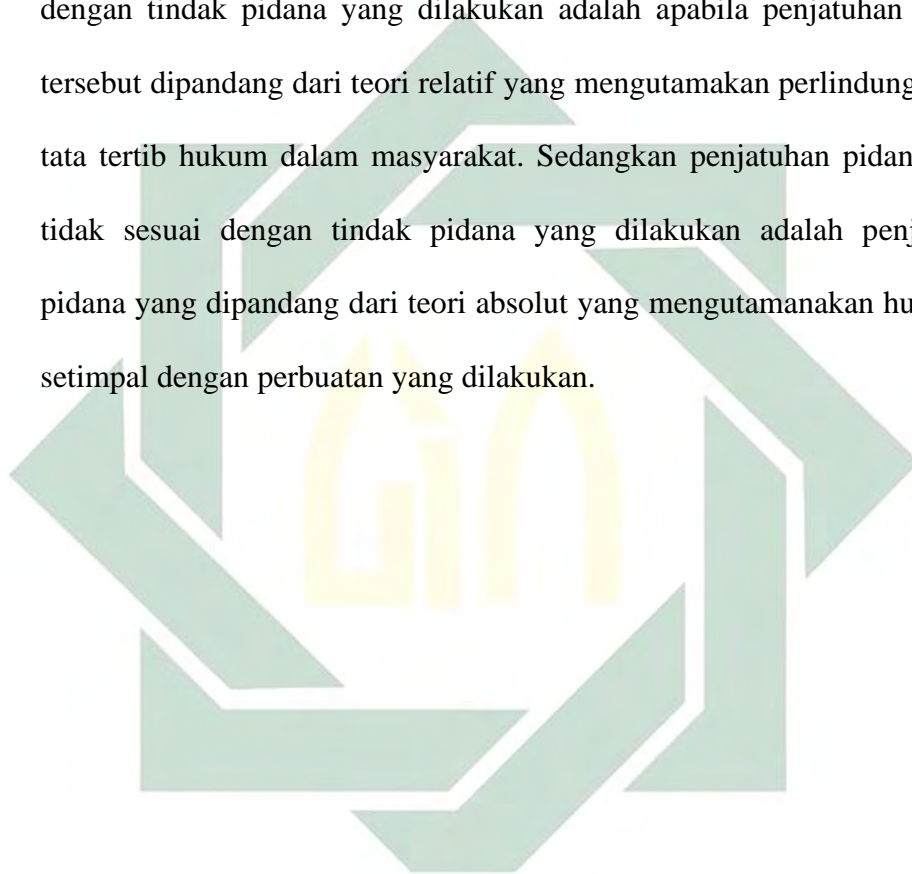
Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan ketentuan perundang undangan pidana yang telah ada.

Penjatuan pidana oleh pengadilan kepada terpidana bukan dianggap sebagai pembalasan saja, tetapi merupakan adanya sesuatu yang tidak dapat dihindarkan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan.

Dan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP juga menyatakan bahwa

Dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pkj, hakim mengambil sistem pembuktian undang-undang secara negatif dimana hakim melihat Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 sebagai dasar hukum yang dilanggar oleh terdakwa, Majelis Hakim juga menggunakan keyakinannya bahwa terdakwa termasuk nelayan kecil, perahu yang digunakan terdakwa tanpa nama berukuran dibawah 5 (lima) gross ton (GT), dan terdakwa melakukan penangkapan ikan sebagai mata pencahariannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dengan alasan itulah Majelis Hakim memutuskan penjatuhan lamanya pidana terhadap terdakwa diterapkan Pasal 100B. Dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan pidana selama 5 bulan kepada terdakwa.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan hasil penelitian penulis bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa sudah ada yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dan ada juga yang tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Penjatuhan pidana yang dianggap sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan adalah apabila penjatuhan pidana tersebut dipandang dari teori relatif yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum dalam masyarakat. Sedangkan penjatuhan pidana yang tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan adalah penjatuhan pidana yang dipandang dari teori absolut yang mengutamakan hukuman setimpal dengan perbuatan yang dilakukan.



PENUTUP

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 74

1. sebaiknya aparat penegak hukum memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Khususnya tindak pidana *illegal fishing* dengan bahan peledak karena merusak ekosistem laut. Hukuman yang dijatuhkan harus mempunyai efek jera sehingga pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
2. Masyarakat diharapkan patuh dan taat pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, jangan sampai membuat kerusakan ekosistem laut. Karena dengan menjaga kelestarian laut, kita akan menjaga kehidupan untuk generasi yang datang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Abdurrahman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Jakarta : Rineka Cipta, 1992.

Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Bulan Bintang 1990.

Andi Sofyan, Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Makassar, Pustaka Pena Press, 2016.

Asadullah Al Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Dede Rosyada, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Jakarta: Lembaga Studi Islam Dan Kemasyarakatan, 1992.

Gunadi, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.

Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers , 2015.

I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2017.

Iqraq Sulhin, *Diskontinuitas Penologi Punitif*, Jakarta: Kencana, 2016.

M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016, 94.

Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004.

Marlina, *Aspek Hukum Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Periklanan* Jakarta: Sofmedia, 2013.

